BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, hal tersebut jelas menunjukkan juga bawasannya Indonesia memiliki modal yang juga besar dan melimpah bagi Indonesia dalam ikhtiar membangun bangsa dan negara di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu bentuk sistem menegerial, sistem pola, serta sistem mekanisme dalam satu kerangka pembangunan nasional.¹

Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita-cita suatu bangsa atau pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila, dan diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram dan rasa keadilan.²

Pembangunan ini harus sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang 1945, yang pada

¹ Esmi Warassih, 2018, **Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional**, Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5 Nomor 1, P-ISSN: 0852-011, Hlm. 1.

² Yessi Anggraini & Armen Yasir, 2015, **Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, volume 9 Nomor 1, P-ISSN: 1978-5186 E-ISSN: 2477-6238, Hlm. 79.

hakikatnya adalah : *"Mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai."*³

Peranan pemerintah dalam perencanaan pembangunan merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku "pelayanan publik" guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dan berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok, fungsinya dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.⁴

Birokrasi adalah lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, di era reformasi saat ini memang dapat dikatakan birokrasi sedikit berbenah. Reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah bahkan ada departemen khusus untuk menangani sistem birokrasi di

³ Rimawan & Fenny Aryani, 2019, **Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima**, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Volume 9 Nomor 3, P-ISSN: 2599-2651, Hlm. 288.

⁴ Armando Soares & Ratih Nurpratiwi, 2015, **Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4 Nomor 2, P-ISSN: 2442-6962, Hlm. 231.

Indonesia ini masih ditemukan banyak celah-celah kelemahan yang masih kelihatan dan menjadi rahasia umum bahwa aparatur sipil negara tidak maksimal dalam mencurahkan kinerjanya dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk peningkatan pelayanan publik. Pengawasan menjadi elemen penting dalam jalannya roda birokrasi pemerintahan demi terwujudnya good governance agar bisa terawasi dengan baik apalagi dengan kondisi zaman yang transparan pada era reformasi ini.⁵

Perilaku feodalistik dalam birokrasi yang dilestarikan oleh pemerintah kolonial ikut memberikan kontribusi besar terhadap penyebab munculnya patologi birokrasi, terutama tindak korupsi di dalam birokrasi. Suburnya budaya pemberian uang pelican, uang semir, uang suap, uang damai, atau praktik budaya pelayanan tahu sama tahu, pada dasarnya merupakan bentuk korupsi yang terus dikembangkan oleh birokrasi dan masyarakat.⁶ Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi namun tampak sia-sia dalam lima tahun belakangan.⁷

⁵ Yusriadi, 2018, **Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan**, Jurnal Adminitrasi Publik, Prodi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Indonesia, Volume 8 Nomor 2, P: ISSN 2548-7787 E-ISSN: 2088-527X, Hlm. 179.

⁶ Irfan Setiawan, 2016, **Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan**, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Volume 42 Nomor 1, P-ISSN: 0216-4019, E-ISSN: 2614-025X, Hal. 29.

⁷ Dwi Maria Handayani, 2019, **Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama**, Jurnal Teologi Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Bandung, Volume 1 Nomor 1, ISSN: 2655-2019, E-ISSN: 2654-931X, Hlm. 1.

Korupsi (corruptie) adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyogok, menyuap, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara. Korupsi juga adalah perbuatan jahat yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum. Dampak korupsi adalah sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, dan telah meluas sampai pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga korupsi sudah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Pemberantasan korupsi diperlukan suatu pengawasan yang intensif dari berbagai unsur yaitu pengawasan melekat, legislatif dan masyarakat.⁸

. Seperti kesejahteraan umum negara terancam, demokrasi tidak fair, menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, penurunan kualitas moral dan akhlak.⁹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga institusi tersebut memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

⁸ Ruslin Abdul Gani, 2017, **Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya, Volume 1 Nomor 2, ISSN: 2338-9516, E-ISSN: 2684-6896, Hal. 14.

⁹ Bandaharo Saifuddin, 2017, **Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**, Jurnal Warta Edisi, Universitas Dharmawangsa, Volume 16 Nomor 4, P-ISSN: 1829-7463, E-ISSN: 2716-3083, Hlm. 14.

kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tipikor. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan serta penyidikan oleh Kejaksaan akan menuju pada proses penuntutan kasus korupsi melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri.¹⁰

Dalam praktek, adanya perbedaan sistem tersebut menciptakan kecenderungan fragmentasi institusi sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tingginya kasus Korupsi sangat dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu faktor penyebab kemiskinan di NTT adalah korupsi yang dilakukan para pengelola keuangan atau anggaran mulai dari tingkat Provinsi hingga Desa, selain menyebabkan kemiskinan, korupsi juga menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia di NTT masih rendah, Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghindari praktik korupsi keuangan daerah atau negara yaitu introspeksi diri sehingga pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik.¹¹

Pada tahun 2016 Indonesia Corruption Watch merilis data kategori penanganan kasus korupsi terbanyak di Indonesia sepanjang tahun 2015, yang menempatkan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada urutan ke-empat setelah provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Berdasarkan data

¹⁰ Ahmad Muchlis, 2016, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan**, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Kejaksaan Negeri Wonogiri, Volume 10 Nomor 2, P-ISSN: 1978-5186, E-ISSN: 2477-6238, Hlm. 346.

¹¹ Rosdianawaty Hatta dan Rifki Khoirudin, 2020, **Analisis Tingkat Kemiskinan di Propinsi NTT**, Jurnal Samudra Ekonomi dan bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Volume 11 Nomor 2, P-ISSN: 2089-1989, E-ISSN: 2614-1523, Hlm. 139.

Pusat Anti Korupsi Undana tahun 2018 pelaku korupsi di NTT pada umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil, swasta, Pejabat/Pegawai BUMD dan Anggota DPRD. Sehingga NTT disinyalir menjadi target operasi KPK sebagai wilayah otonom yang perlu diwaspadai tingkat korupsinya.¹²

Intelijen adalah misi negara yang mengedepankan aspek aktualisasi kognitif dan kecerdasan inteligensi dalam mengambil keputusan didasarkan pada informasi yang akurat, cepat, tepat, dan terkini. Prinsip-prinsip intelijen demokratik yang dijalankan oleh dinas-dinas intelijen negara yang profesional dan efektif merupakan sendi dasar yang mutlak ditumbuh kembangkan demi terwujudnya keamanan dalam negeri. Peranan Intelijen dalam pengungkapan tindak pidana yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.¹³

¹² Jefirstson Richset Riwukor, 2020, **Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur**, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Universitas Indo Global Mandiri, Volume 11 No. Hlm. 231.

¹³ I Made Dwi Narendra Dananjaya, 2022, **Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng)**, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 3 Nomor 1, P-ISSN: 2746-5039, E-ISSN: 2809-9656, Hlm. 16.

Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Intelijen dan Tindak Pidana Korupsi diantaranya :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- iii. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- iv. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- v. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- vi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- vii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- viii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- ix. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat dan tepat dan profesional.¹⁴ Khususnya dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manggarai yang terletak di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Manggarai telah melakukan berbagai perubahan. Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul: **“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan tindak pidana korupsi?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan tindak pidana korupsi?

¹⁴ Suwari Akhmaddhian, 2012, **Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Bekasi)**, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 12 Nomor 3, ISSN Print: 1410-0797 e-ISSN: 2407-6562, Hlm. 465.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar permasalahan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah:

1. Peranan intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Perlunya dikemukakan bahwa faktor-faktor yang dibahas hanya sebatas faktor yang mempengaruhi intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Melalui pembatasan ruang lingkup pembahasan masalah tersebut diatas penulis yakin dapat membahas permasalahan komperensif dan komparatif.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.

2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikirannya secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
6. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peranan intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan tindak pidana korupsi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai persepektif ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan

untuk menghasilkan argumentasi , teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.¹⁶

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷

¹⁵ Dr. Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, **Metode Penelitian Hukum: Doktrinan dan Non-Doktrinal**, Cetakan 1, CV. Social Politik Genius, Makassar, Hlm. 13.

¹⁶ Zaenudin Ali, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 14.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 280.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di Kejaksaan Negeri manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana Peranan Intelijen mengenai tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Manggarai.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan di Kejaksaan Negeri Manggarai.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Manggarai.

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan

pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai khususnya yang bertugas untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Data primer juga merupakan data yang memiliki tingkat dan reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dan didukung oleh data sekunder.¹⁸

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, aturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-

¹⁸ Rianto Adi, 2021, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Cetakan 1, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 57.

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum, hasil seminar, hasil penelitian dan buku-buku yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang dengan:

- a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Dalam hal tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat, langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui perihal kondisi yang terjadi atau membuktikan keadaan sebenarnya dari sebuah penelitian yang sedang dilaksanakan.

- b. Teknik Wawancara

Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai terutama Jaksa yang bertugas dalam penanganan dugaan perkara tindak pidana korupsi.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan Teknik Studi Dokumentasi. Studi dokumen kepustakaan yaitu

bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca, memahami selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

1.5.5 Teknik Analisa data

Setelah seluruh data terkumpul maka selanjutnya data akan diolah. Pengolahan data yang penulis gunakan adalah editing yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulannya. Data-data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima)

bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.¹⁹

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Peranan intelijen Kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.6.3 BAB III PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada BAB III ini akan membahas mengenai, hak dan kewajiban intelijen kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan Pelaksanaan fungsi intelijen kejaksaan dalam penanganan tindak

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, Hlm.48.

pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai, faktor-faktor yang mempengaruhi peranan intelijen kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang akan dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

UNMAS DENPASAR